

## **Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Wisata Minat Khusus di Kabupaten Ponorogo**

**\*Nurul Rahmawati, Yusuf Adam Hilman, Bambang Triono**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

\*rahmaviesha27@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Special interest tourism is a tour aimed at tourists who have a specific purpose or interest and motivation in traveling. In Ponorogo Regency itself, which is classified as special interest tourism on the Tourism Office website there are several tours such as Gunung Gajah Tour, Tanah Goyang Tour, Bedes Mountain Tour, and Pumpak Pare tour. But the existence of the tour all had only briefly gone viral but after a few months no longer heard the news. This study wants to find out how the role of the Department of Tourism in the Management of Special Interest Tourism in Ponorogo Regency. The purpose of this study is to find out the role of the Ponorogo Tourism Office and to know what obstacles are faced by the Ponorogo Tourism Office in the Management of Special Interest Tourism in Ponorogo Regency. The research method used is qualitative. The process of collecting data by interviewing the heads of community information groups in the district of Ponorogo. Data can be obtained from interview scripts, field notes or memos, and official documents. This analysis uses four indicators, namely Planning, Organizing, Movement and Supervision. The Tourism Office itself is seen as lacking in providing guidance and assistance in managing the specially meant tourism itself. many villages or tourism managers do not receive training, coaching, and assistance that is uneven, they are as if not noticed by the Department of Tourism. It can be concluded that the role of the Ponorogo Office has not been maximized and there are many shortcomings in training, guidance, assistance, and monitoring carried out by the Pariwisata Office, not necessarily and there is an imbalance in carrying out all of its duties and responsibilities.*

**Keywords:** *Special Interest Tourism; The Role of Tourism Office; Tourism of Ponorogo*

### **ABSTRAK**

Wisata minat khusus merupakan wisata yang di tujukan kepada wisatawan yang mempunyai tujuan atau ketertarikan dan motivasi khusus dalam berwisata. Di Kabupaten Ponorogo sendiri yang digolongkan dalam wisata minat khusus di website Dinas Pariwisata ada beberapa wisata seperti Wisata Gunung Gajah, Wisata Tanah Goyang, Wisata Gunung Bedes dan wisata Tumpak Pare. Tetapi eksistensi dari wisata itu semua hanya sempat viral sebentar tetapi setelah beberapa bulan sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Peran dari Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Wisata Minat Khusus di Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Ponorogo dalam Pengelolaan Wisata Minat Khusus di Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai ketua kelompok informasi masyarakat yang ada di kabupaten ponorogo. Data di dapat dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi. Analisis ini menggunakan empat indikator yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan dan Pengawasan. Dinas Pariwisata sendiri di pandangan kurang dalam pemberian pembinaan dan bantuan dalam pengelolaan wisata miant khusus itu sendiri. banyak desa atau pengelola wisata tidak memperoleh pelatihan, pembinaan dan bantuan yang tidak merata, mereka seperti tidak diperhatikan oleh Dinas Pariwisata. Dapat disimpulkan peran dari Dinas Ponorogo belum maksimal dan banyak kekurangan dalam pelatihan, pembinaan, bantuan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, belum merta dan terjadi ketimpangan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya.

**Kata Kunci:** Wisata Minat Khusus; Peran Dinas Pariwisata; Pariwisata Ponorogo

## **PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata merupakan salah satu alternatif pemasukan bagi pendapatan daerah maupun devisa untuk Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dituliskan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Aturan mengenai pariwisata diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dijelaskan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata bisa menjadi penopang ataupun menjadi sektor pemasukan yang besar bagi suatu negara karena sektor pariwisata di Indonesia telah menjadi core business.

Pentingnya pariwisata menjadi bisnis inti di Indonesia dapat dilihat bahwa pariwisata merupakan penyumbang BPD, devisa, serta lapangan pekerjaan yang menjanjikan terutama pada hotel dan restoran. Pada tahun 2015 sektor pariwisata merupakan peringkat ke empat dalam penyumbang devisa terbesar pada tahun 2016 devisa yang didapat mencapai 13.5 miliar dolar AS pertahun, pada tahun 2017 pariwisata menyumbang 16.8 miliar dolar AS, pada tahun 2018 meningkat 20 persen menjadi 20 miliar dolar AS dan pada tahun 2019 di proyeksikan dapat memperoleh bruto dalam domestic sebesar 15 persen dari tahun 2018 sebesar Rp 280 triliun untuk devisa serta dapat menyerap 13 juta tenaga pekerja. (Cahyu, 2019).

Meningkatnya pemasukan devisa tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya

kunjungan wisatawan dari manca negara untuk berlibur di Indonesia. Perlu adanya peningkatan pelayanan untuk memuaskan wisatawan dan perlu adanya pengalihan kembali potensi wisata di Indonesia yang belum terpublikasikan supaya wisata tidak jenuh dengan wisata yang ada di Indonesia.

Kementrian juga mendorong pemerintah daerah untuk berkreatifitas dan berinovasi tetapi harus sejalan dengan hukum yang telah berlaku. Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menggali dan mempromosikan potensi wisata yang ada didaerahnya masing-masing. Peran pemerintah daerah harus berkelanjutan dengan merangkul para penggiat pariwisata dan stakeholder untuk menggali dan meningkatkan pariwisata yang ada di daerah. Perlu juga dilakukan pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti penyediaan saran dan prasarana transportasi dalam menunjang pariwisata daerah. Dalam pengembangan ekonomi perlu juga dilakukan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta dan juga masyarakat sekitar sehingga dapat terwujud pengelolaan pariwisata yang baik pada seluruh bidang pendukung agar memberikan dampak yang berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan daerah masyarakat dan devisa negara.

Wisata minat khusus merupakan wisata yang belum lama ini dikenalkan di Indonesia. Sejak tahun 2012 Indonesia baru menggencarkan program wisata minat khusus melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi. Mahasiswa Universitas Indonesia bersama Kelompok Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) UI berhasil membuka dan memetakan wisata minat khusus baru di Papua Barat. Wisata baru itu seperti Danau Anggi di kabupaten Arfak untuk sport Paralayang, Distrik Testega di Kabupaten Arfak juga mempunyai banyak gua yang belum pernah dimasuki dan sungai Prafi di Manukwari menyuguhkan banyak jeram. Wisata minat khusus tidak hanya terbatas pada petualangan aktif, tapi juga jenis petualangan *romantic*, seperti: *hot*

*spring*, serta *soft adventure* seperti bermain kano dan *scuba diving*. Indonesia masih mempunyai segudang potensi wisata dan masih asli tentunya masih banyak destinasi wisata yang dapat di gali dan di kembangkan (Adri, 2018).

Kabupaten ponorogo memiliki cukup banyak destinasi wisata khusus, namun selama ini sektor pariwisata yang di kembangkan adalah destinasi budaya, potensi tersebut jika dikembangkan akan banyak menambah destinasi baru yang bisa di kemas menjadi salah satu alternatif destinasi baru yang memiliki prospek kedepan yang baik.

Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan Wisata minat khusus sendiri masih tergolong baru serta masih belum familiar dikalangan masyarakat Ponorogo sendiri. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang apa itu wisata minat khusus padahal mereka sering bahkan pernah berkunjung kesalah satu wisata yang tergolong dalam wisata minat khusus. Wisatawan biasanya mempunyai kemampuan keahlian atau ketrampilan tertentu yang cocok dengan objek wisata minat khusus yang akan di kunjungi. Wisata minat khusus itu sendiri contohnya seperti mendaki gunung, berkemah, *rafting* atau lainnya. Tertulis juga pada pada Pasal 20 UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang mengatakan bahwa: perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

## TINJAUAN PUSTAKA

Peran merupakan segala perilaku yang di harapkan oleh orang lain kepada orang lain sesuai kedudukan dalam suatu sistem. Peran di pengaruhi oleh keadaan sosial dari dalam dan atau dari luar serta bersifat stabil. Peran juga didasarkan atas penghargaan orang lain sesuai dengan posisi, kedudukan dan norma pada situasi sosial tertentu (Nurillah & Yusrizal, 2018).

Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian

perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Aturan mengenai pariwisata diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dijelaskan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Selain itu terdapat aturan lain yang menjadi acuan Dinas Pariwisata di Kabupaten Ponorogo yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016. Salah satu bidang yang ada dalam Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo adalah Bidang Promosi, dimana salah satu tugasnya tentang pengenalan pariwisata Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama didaerah tujuan wisatawan dan tentunya agar wisatawan membelanjakan uangnya sebanyak – banyaknya selama melakukan perjalanan tersebut (Chatamallah, 2008).

Pengelolaan adalah pengendalian atau penyelenggaraan berbagai sumber secara berhasil guna mencapai sasaran, dalam pengertian yang lebih sempit pengelolaan adalah jenis kepemimpinan yang bertujuan khusus untuk tercapainya tujuan dari organisasi (Ahyak, 2018). Pengelolaan yaitu upaya untuk mencapai tujuan dengan menjalankan manajemen dengan dasar perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Yachya, Wilopo, & Mawardi, 2016).

## METODE

Lokasi Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah lokasi wisata yang ada dalam website Dinas Pariwisata yang tergolong dalam wisata minat khusus dan yang mengetahui tentang pengelolaan dari wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo. Kriteria yang dalam menentukan lokasi adalah Wisata Minat Khusus yang masuk dalam website dinas Pariwisata dan dinas pariwisata sebagai Pembina pariwisata di Kabupaten Ponorogo, dari kriteria tadi yang termasuk dalam lokasi penelitian ini yaitu seperti Wisata Gunung Gajah yang ada Desa Gajah, Kecamatan Sambit berjarak 24 kilometer dari pusat kota, Wisata Tanah Goyang berlokasi di Desa Pudak wetan, Kecamatan Pudak 34 kilometer dari pusat kota , Wisata Gunung Bedes berlokasi di Dusun Buyut, Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko sekitar satu jam perjalanan dari pusat kota ponorogo, Wisata Tumpak Pare berlokasi didesa cepoko Kecamatan Ngrayun 37 kilometer dari pusat kota dan Wisata Gunung Gede yang berlokasi di Jl. Arjuna, Tatung Lor, Balong, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo ber alamatkan di Jalan Pramuka No.19A, Nologaten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

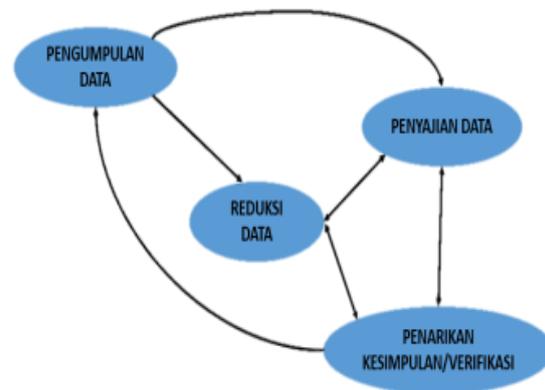
Penelitian ini memanfaatkan teknik penelitian deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data menggunakan dokumentasi, kata, gambar. Data di peroleh dari wawancara mendalam, catatan, teks naskah, laporan dilapangan dan dokumen resmi lainya yang saling berhubungan dan terkait dengan penenelitian yang dilakukan dengan penyusunan teori dari bawah ke atas (Moleong, 2014)

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *Snow ball* atau teknik bola salju, dimana pilihan informan yang di sarankan oleh informan sebelumnya. Jadi informan yang akan digunakan adalah pengelola wisata keahlian khusus dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo Bidang

Pengembangan Pariwisata Seksi Obyek dan Daya Tarik wisata.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman 1992, dalam analisis ini terdapat tiga aspek penting yaitu Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan(basrowi & suwandi, 2008).

Analisis Miles dan Huberman dalam pelaksanaan pengumpulan data harus aktif karena proses dari pengumpulan data sampai penarikan kesimpulan dilakuan secara berulang-ulang dalam sampai penelitian siap dikerjakan, baru proses tersebut berakhir.



Gambar 1. Analisis Data Miles dan Huberman 1992

(Sumber: data Sekunder)

## PEMBAHASAN

Berdasarkan penyajian data di atas dapat kita malakukan penganalisan data dari peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo. Aturan mengenai Pariwisata diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dijelaskan pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan 2 bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Selain itu terdapat aturan lain yang menjadi acuan Dinas Pariwisata di Kabupaten Ponorogo yang

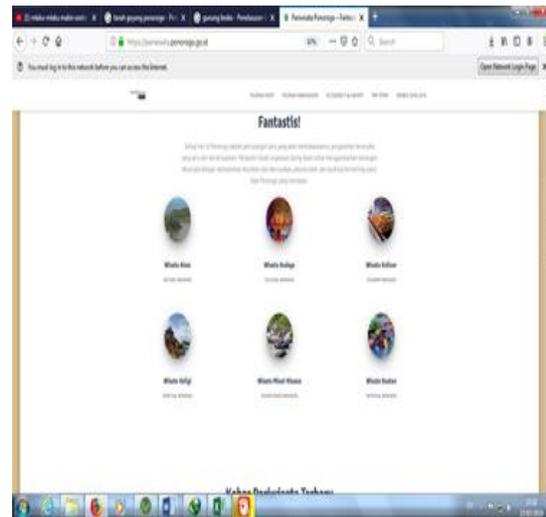
tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016. Untuk dapat melihat peran dari Dinas Pariwisata dalam pengelolaan wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo memiliki menggunakan beberapa indikator.

a. Perencanaan (*Planning*)

Dapat dilihat faktor-faktor dalam mengukur sebuah perencanaan dapat ditafsirkan

- 1) *Spesifik*, konsep perencanaan masih belum jelas fokus dari wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo.
- 2) *Measurable*, kebanyakan program kerja dalam pengelolaan sulit untuk di ukur karena semua urusan di limpahkan ke desa yang terkendala masalah pendanaan dan sumber daya yang mumpuni.
- 3) *Realistic*, Dinas Pariwisata menyerak semua tanggung jawab pengelolaan kepada Kepala Desa dengan tetapi desa mengalami kesulitan karena sumber daya yang dimiliki terbatas.
- 4) *Time*, yaitu waktu dalam perencanaan pengelolaan dari dinas tidak jelas karena semua tanggung jawab diserahkan ke desa sehingga lambat dalam pengelolaan dan perkembangan wisata minat khusus.

Pemerintah memberikan stimulus untuk masyarakat berinisiatif untuk memajukan desanya dengan potensi potensi di desanya. Pemerintah Daerah yang di wakili oleh Dinas Pariwisata memberikan pembinaan dan promosi untuk membantu wisata minat khusus dan wisata lainnya. Dalam hal promosi Wisata hanya ada di website Dinas Pariwisata saja untuk cara lain tidak ada usaha lain seperti membuat spanduk, baliho atau lainnya untuk promosi wisata –wisata tersebut.



Gambar 2. Website Dinas Pariwisata (Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo)

Perlu adanya adanya sosialisasi kepada desa-desa yang mempunyai wisata desa atau pun yang berencana mengembangkan wisata didesa, khususnya wisata minat khusus. Sosialisasi ini bertujuan memberikan gambaran kepada desa-desa untuk membuat perencanaan jangka pendek dan panjang sehingga wisata desa bisa terus berkembang agar wisata tersebut tidak diam di tempat ataupun hilang. Dinas Pariwisata juga harus berperan aktif dalam mengawal dari setiap perkembangan wisata-wisata di Ponorogo sehingga terus berkembang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pertemuan rutin sudah ada yang melakukan dari tingkat pengelola wisata setia desa masing-masing tetapi untuk pertemuan rutin dengan Dinas Pariwisata sendiri belum ada sampai sekarang pertemuan mungkin sekedar ada pelatihan saja. Dinas Pariwisata kurang memberikan pengarahan untuk pengelolaan wisata di desa masing-masing pengelola wisata minat khusus sehingga setiap pengelola kebingungan dalam mengembangkan potensi wisata minat khusus menjadikan pengelola berjalan begitu saja tanpa ada perencanaan jangka panjang.

Salah satu bidang yang ada dalam struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo adalah Bidang Promosi. Dimana salah satu tugasnya tentang pengenalan

pariwisata Kabupaten Ponorogo. Terkelolanya wisata dengan baik, akan menimbulkan wisatawan agar lebih lama tinggal di daerah wisata. Pengelolaan wisata minat khusus Dinas Pariwisata berperan sebagai pembinaan ke souvenirnya jadi untuk meningkatkan ekonomi kreatif bagi masyarakat desa untuk pengelolaan tingkat Desa mereka bekerja sama dengan pemuda atau lembaga desa tertentu untuk melakukan pengelolan lokasi wisata tersebut. Dinas Pariwisata dalam tugas promosi dan pembinaan belum maksimal dapat dilihat banyaknya ketimpangan dalam melakukan pembinaan serta promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di pandang pilih kasih dan tidak merata juga untuk setiap jenis wisata di Kabupaten Ponorogo khususnya Wisata Minat Khusus masih butuh banyak pengembangan bai dari fasilitas pendukung maupun pengelolaan wisata.

*a. Pergerakan (Actuating)*

Adanya wisata minat khusus di dukung oleh pemerintah desa, kabupaten serta masyarakat sekitar dari lokasi wisata minat khusus itu sendiri. Belum ada capaina yang memuaskan dari wisata minat khusus di kabupaten ponorogo tapi mungkin Cuma pernah ada setasiun televisi yang pernah *shooting* di lokasi minat khusus. Belum ada dampak yang terasa dari adanya wisata mungkin hanya terlihat adanya orang yan datang berkunjung kelokasi wisata dan ada perubahan dalam akses jalan menuju lokasi wisata. Kenapa hal tersebut bisa terjadi karena lambatnya perkembangan dalam mingkatkan wisata minat khusus. Sehingga untuk sampai sekarang belum ada capaian yang membanggakan yang di didapat dari adanya wisata miant khusus.

Pembuatan jembatan menuju lokasi wisata dilakukan swadaya oleh masyarakat dengan menggunakan tiang listrik sisa yang tidak di pakai. Pada dasarnya masyarakat di sekitar lokasi wisata sangat menyambut baik dari adanya wisata di desa mereka tetapi wisata tersebut belum memberikan dampak terhadap masyarakat

karena wisata tersebut belum maskimal dalam pengelolaannya. Semua wisata khusus di Kabupaten Ponorogo belum dapat menghasilkan pemasukan yang pasti karena setiap wisata belum maksimal, baik itu dari sarana dan prasarana maupun dalam pengelolaan wisata. Dari itu semua tidak ada pemasukan walaupun ada lokasi wisata minat khusus. Untuk pengembangan dan pengelolaan Wisata Minat Khusus desa sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi terbatas oleh sumber dana dan sumber daya manusia, sedangkan Dinas Pariwisata belum maksimal dalam pemberian pelaitan dan pendampingan untuk pengelolaan dapat dilihat dari masih banyak desa atau pengelola wisata minat khusus belum mendapat pelatihan dan pembinaan dengan jangka penjang dan berkelanjutan.

*b. Pengawasan (Controlling)*

Dinas melakukan pemantauan ke kelompok sadar wisata atau pokdarwis jadi untuk cara melayaninya tetap sapta pesonanya tetapi pengurus wisata itu sendiri belum ada masukan atau pun pengawasan atau masukan untuk meningkatkan wisata. Dinas Pariwisata perlu melakukan perubahan sisten dalam penangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo sehingga terjadi pemerataan dalam pembinaan wisata. Serta adanya pengawasan dalam pegelolaan wisata minat khusus sehingga didapatkan peningkatan yang terus menurun secara bertahap dan teratur.

Dinas Pariwisata terkesan pasif sehingga setiap tahun tidak ada evaluasi untuk pengelolaan wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo sehingga wisata akan sulit berkembang karena tidak ada evaluasi untuk memperbaiki dan menikatkan wisata minat khusus itu sendiri. Fungsi dari monitoring dan evaluasi adalah untuk memperbaiki saat ada kesalahan atau kekurangan dalam suatu pengelolaan dan meningkatkan suatu hal sehingga para wisatawan merasa puas seteleh berkunjung ke lokasi wisata. Itu semua tidak berjalan

sehingga dapat dilihat banyak wisata minat khusus yang sulit untuk berkembang.

c. **Kendala Dinas Pariwisata Ponorogo Dalam Pengelolaan Wisata Minat Khusus Di Kabupaten Ponorogo**

Peran Dinas dalam pengelolaan wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo mendapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi peran Dinas Pariwisata adalah

- a. Tidak adanya perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan wisata minat khusus.
- b. Kurangnya pertemuan dan komunikasi antara pengurus wisata dengan Dinas Pariwisata untuk memajukan pengelolaan wisata minat khusus.
- c. Kendala dalam dana, kebanyakan dari pengelolaan wisata belum memiliki pemasukan untuk mengelola organisasi.
- d. Kurang bahkan belum adanya fasilitas pendukung dalam mendukung lokasi wisata sehingga dapat membuat nyaman pengunjung.

**KESIMPULAN**

Wisata minat khusus adalah suatu destinasi wisata yang di tertuju pada wisatawan memiliki tujuan serta ketertarikan dan keinginan tersendiri dalam berwisata. Wisata minat khusus merupakan langkah dalam pengembangan dari sektor pariwisata, sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 1990 “tentang kepariwisataan yang mengatur perusahaan obyek dan daya Tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya Tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.”

Pemerintah memberikan stimulus untuk masyarakat berinisiatif untuk memajukan desanya dengan potensi potensi di desanya. Banyak wisata belum memiliki program jangka panjang untuk pengelolaan wisata sehingga banyak wisata yang tidak ada peningkatan bahkan

hilang tidak dikenal masyarakat lagi. Dinas Pariwisata hanya melakukan promosi melalui website serta media sosial dinas saja tidak ada cara atau usaha seperti pembuatan even wisata ataupun pembuatan baliho atau spanduk untuk mempopulerkan wisata minat khusus. Dinas Pariwisata sendiri di pandangan kurang dalam pemberian pembinaan dan bantuan dalam pengelolaan wisata minat khusus itu sendiri.

Dalam pengelolaan pariwisata sendiri sudah di bagi dalam strukturnya harusnya sudah ada bidang yang mendukung dan memberikan masukan dalam pengelolaan pariwisata minat khusus. Adanya pengelolaan yang tepat sangat dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata guna menarik wisatawan didaerah wisata, supaya wisatawan berbelanja dengan uangnya selama dalam perjalanannya tersebut. Pada kenyataan dilapangan dalam Pengelolaan wisata minat khusus Dinas Pariwisata berperan sebagai pembinaan ke souvenirnya. Tapi pada kenyataannya banyak desa atau pengelola wisata tidak memperoleh itu semua mereka seperti tidak diperhatikan oleh Dinas Pariwisata. Dalam pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan juga tidak merata banyak dari mereka hanya mendapat pelatihan sekali atau dua kali saja ada juga yang hanya mendapat bantuan seperti toilet umum bahkan banyak yang tidak mendapatkan pelatihan dan bantuan dari Dinas Pariwisata.

Pada dasarnya masyarakat di sekitar lokasi wisata sangat menyambut baik dari adanya wisata di desa mereka tetapi wisata tersebut belum memberikan dampak terhadap masyarakat karena wisata tersebut belum maksimal dalam pengelolaannya. Semua wisata khusus di Kabupaten Ponorogo belum dapat menghasilkan pemasukan yang pasti karena setiap wisata belum maksimal, baik itu dari sarana dan prasarana maupun dalam pengelolaan wisata. Dari itu semua tidak ada pemasukan walaupun ada lokasi wisata minat khusus.

Monitoring dan pengwasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata hanya

sebatas dinas melakukan monitoring ke kelompok sadar wisata atau pokdarwis jadi untuk cara melayaninya tetap sapa pesonanya tatepi belum ada evaluasi dan monitoring secara langang turun kelapangan bersama pengelola wisata di desa. Dinas Pariwisata terkesan pasif sehingga setiap tahun tidak ada evaluasi untuk pengelolaan wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo sehingga wisata akan sulit berkembang karena tidak ada evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan wisata minat khusus itu sendiri.

Peran Dinas dalam pengelolaan wisata minat khusus di Kabupaten Ponorogo mendapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi peran Dinas Pariwisata adalah tidak adanya perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan wisata minat khusus. Kurangnya pertemuan dan komunikasi antara pengurus wisata dengan Dinas Pariwisata untuk memajukan pengelolaan wisata minat khusus. Kendala dalam dana, kebanyakan dari pengelolan wisata belum memiliki pemasukan untuk mengelola organisasi dan kurang bahkan belum adanya fasilitas pendukung dalam mendukung dalam lokasi wisata sehingga dapat membuat nyaman pengunjung.

Peran dari Dinas Ponorogo belum maksimal dan banyak kekurangan dalam pelatihan, pembinaan, bantuan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Peran Dinas Pariwisata belum merta dan terjadi ketimpangan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya.

1. Perlu adanya perubahan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Ponorogo dan perlu adanya peran aktif dari Dinas Pariwisata sehingga harapan diadakannya pengelolaan wisata dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya.
2. Perlu kerjasama dengan lembaga ataupun dengan organisasi lain untuk peningkatan pelatihan terhadap pariwisata untuk peningkatan kualitas

sumber daya manusia dalam pengelolaan itu sendiri.

Monitoring dan evaluasi masih dirasa sangat kurang sehingga perlu adanya pembenahan dalam proses tersebut, dengan adanya monitoring dan evaluasi yang terlihat dan berkelanjutan sehingga dapat berpengaruh dalam pengelolaan pariwisata minat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adri, A. (2018). *goodnewsfromindonesia.id*. Retrieved from [www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id): <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/09/19/destinasi-wisata-minat-khusus-di-indonesia-bersiap-menyambut-peminatnya>
- Ahyak. (2018). *Strategi Pengelolaan Pariwisata Halal Kota Surabaya (Studi Kasus pada Wisata Sunan Ampel Surabaya)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Alwasilah, A. (2012). *pokoknya kualitatif dasar-dasar merancang dann melakukan penelitian kualitatif*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Cahyu. (2019). *liputan6*. Diambil kembali dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com): <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3650849/industri-pariwisata-indonesia-kian-meningkat-pesat>
- Chatamallah, M. (2008). Strategi" Public Relation" dalam Promosi Pariwisata: Studi Kasus dengan Pendekatan" Marketing Public Relations" di Provinsi Banten. *Mediator*.
- Dinas Pariwisata. (2019). *pariwisata.ponorogo.go.id*. Retrieved from <https://pariwisata.ponorogo.go.id>: <https://pariwisata.ponorogo.go.id/wisata-minat-khusus/>

- Elbas, F. (2019). *pariwisata.ponorogo.go.id*. Retrieved from <https://pariwisata.ponorogo.go.id>: <https://photos.google.com/share/AF1QipP19HPXtkTJip-HQjrXxV0oPulqprnGmtQwn7viHx4ZlhCjHCHGtgBcj8JmPZSITg/photo/AF1QipPvSK4rC4PK9AXJGf8xM5IxAW08ocZmGVCq59LL?key=ZGc1WmJEaFkxaVRjS3NZVjNGNEcwZUILZjJoVzdB>
- Fitri, E. L. (2018). Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Kampung Tenun Samarinda. *Administrasi Bisnis*.
- Google Maps. (2019). *pariwisata.ponorogo.go.id*. Retrieved from <https://pariwisata.ponorogo.go.id>: <https://www.google.co.id/maps/place/Gunung+Gajah/@-8.0269809,111.4907967,773m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x2e790d272d780043:0xb4a383fc1fb9372c!8m2!3d-8.0269809!4d111.4929854?hl=id>
- Gunawan, I. (2015). *metode penelitian kualitatif teori dan praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Izdiharibrahimov. (2019). *pariwisata.ponorogo.go.id*. Retrieved from <https://pariwisata.ponorogo.go.id>: <https://photos.google.com/share/AF1QipP19HPXtkTJip-HQjrXxV0oPulqprnGmtQwn7viHx4ZlhCjHCHGtgBcj8JmPZSITg/photo/AF1QipPvSK4rC4PK9AXJGf8xM5IxAW08ocZmGVCq59LL?key=ZGc1WmJEaFkxaVRjS3NZVjNGNEcwZUILZjJoVzdB>
- Kurnaiwan, D. (2019). *liputan6.com*. Retrieved from [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com): <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3243470/indahnyabukitgedetempatwisataparalayangdi-ponorogo>
- Miraza, S. A. (2019). *pariwisata.ponorogo.go.id*. Retrieved from [www.pariwisata.ponorogo.go.id](http://www.pariwisata.ponorogo.go.id): <https://photos.google.com/share/AF1QipP19HPXtkTJip-HQjrXxV0oPulqprnGmtQwn7viHx4ZlhCjHCHGtgBcj8JmPZSITg/photo/AF1QipM9KpXhKB9oVH8ieWPVLZ9h0CBNWpGYcgaVIVwi?key=ZGc1WmJEaFkxaVRjS3NZVjNGNEcwZUILZjJoVzdB>
- Moleong, I. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdiyansyah, H. (2019). *cnnindonesia.com*. Retrieved from [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com): <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180724173348-269-316656/wisata-minat-khusus-gerbang-menuju-geopark>
- Sarwono, J. (2006). *metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Siam, N. U. (2015). Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Objek Wisata. *Jurnal Ipteks Terapan*.
- Terra. (2019, 31 7). *medium.com*. Retrieved from <https://medium.com>: <https://medium.com/@TERRAITB/poac-planning-organizing-actuating-and-controlling-manajemen-organisasi-ea982e20529>
- Yachya, A. N., Wilopo, & Mawardi, M. K. (2016). Pengelolaan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis CBT (Community Based Tourism) (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Yanto, Y. (2017). Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*.